



# Masyarakat dan Persoalan Definisi Situasi: Perspektif William I. Thomas

Bernadus Renwarin

70

**Abstract:** *Definition of situation*, a term coined by W.I. Thomas, reflects and represents human experience toward his environment. It is also a means to identify factors that are playing in his circumstances and give light to his personal existence. Definition of situation shapes the reality under which is scrutinied, as well as the identity of the subject who defines the reality. Thomas views that there are three types of definition of situation according which society is constructed, i.e. society that clings to the tradition, society that is adaptable to its environment, and society that is creative and innovative. With this definition of situation the articles analysis the situation in Indonesia, Papua, and Islamic community in Indonesia.

**Keywords:** definisi situasi • tradisi • identitas • kesadaran kolektif • komunitas baru • epistemologi orang dalam • pertukaran subyektivitas



ara masyarakat mengartikan dan merumuskan keberadaannya secara khas disebut oleh William Isaac Thomas sebagai cara masyarakat “*mendefinisikan situasinya*”. Dengan menggunakan istilah William Isaac Thomas tersebut, melalui tulisan ini ingin dikedepankan sejumlah realitas sosial yang menunjukkan bagaimana suatu kelompok masyarakat dalam konteks kehidupan sosial-budaya dan politik serta agama, mencoba mendefinisikan situasi sebagai suatu representasi pengalaman hidupnya sekaligus sebagai suatu tanggapan atas situasi yang dialaminya.



Untuk menjelaskan maksud tersebut akan dibuat gambaran umum mengenai latarbelakang William Isaac Thomas sebagai penggagas ide mengenai persoalan “definisi situasi” dan kemudian akan diangkat pula sejumlah pengalaman sebagai refleksi atas pergumulan masyarakat mendefinisikan situasi dan dirinya. Beberapa contoh diangkat untuk melihat relevansi teori W.I. Thomas tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kemudian dibuat suatu tinjauan lain untuk menyoroti secara umum pendekatan definisi situasi, yang diambil dari perspektif filsafat ilmu sosial kontemporer. Dari perspektif ini, cara suatu kelompok atau komunitas masyarakat merumuskan situasi dan diri, dapat dikatakan merupakan hasil dari apa yang disebut sebagai “*epistemologi orang dalam*”. Hal yang menarik dan menurut hemat kami perlu digumuli oleh masyarakat Indonesia saat ini sebagai suatu komunitas bangsa adalah: “*apakah arti dan dampak serta konsekuensi dari cara suatu komunitas entah itu komunitas etnik, komunitas budaya dan daerah serta komunitas agama, mendefinisikan situasi dan dirinya, bagi konteks kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang pluralistik dan potensial untuk disintegratif?*”

Kehidupan masyarakat selalu ditandai dan diwarnai oleh adanya perjumpaan antar individu dan kelompok yang mengakibatkan terjadinya *pertukaran-pertukaran subyektifitas*. Namun dapat dipertanyakan *apakah proses pertukaran subyektifitas itu merupakan sebuah ekspresi yang spontan dengan ciri keterbukaan yang ditandai oleh apresiasi yang tinggi di antara sesama anak bangsa atau apakah relasi yang dibangun melalui pertukaran subyektifitas itu hanya merupakan sebuah wacana (politik) yang diwarnai oleh rekayasa dan dominasi?*

Ciri dari ekspresi pengalaman yang disebut terakhir ini dapat dikatakan hanya akan memunculkan berbagai *prasangka kelompok* dan *stigma* di antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain, seperti yang terjadi selama ini baik di Indonesia maupun di bagian dunia lainnya<sup>1</sup>. Dalam kondisi seperti itu strategi apa yang diperlukan untuk membangun komunitas atau masyarakat yang ideal, yang bebas prasangka dan bebas dominasi menuju terbentuknya suatu komunitas masyarakat yang lebih manusiawi, bermartabat dan setara sebagai hasil suatu proses definisi situasi bersama?

### **Latarbelakang William Isaac Thomas dan studinya**

Chicago sejak akhir abad 19 berkembang sebagai salah satu kota metropolitan yang ditandai dengan adanya gedung-gedung pencakar langit, industri-industri, toko-toko besar, daerah-daerah bisnis yang sibuk, museum, rumah sakit, berbagai universitas dan sebagainya. Sebagai kota metropolitan banyak kaum

---

<sup>1</sup> Misalnya lihat, Liem, 2000.

imigran berdatangan ke kota tersebut, antara lain orang-orang dari Polandia. Sebagai seorang sosiolog ia tertarik dengan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan kaum urban di perkotaan dan secara khusus terhadap konsentrasi kehidupan komunitas Polandia di kota itu. Atas dukungan satu yayasan swasta kemudian ia melakukan penelitian terhadap komunitas Polandia tersebut.

Selain komunitas Polandia yang menjadi perhatian W.I. Thomas, sebenarnya masih terdapat juga konsentrasi masyarakat lainnya seperti orang-orang Irlandia, Jerman, Skandinavia, Italia, Yunani, Yahudi dan Negro. Agar dapat berhasil dalam penelitian tersebut, pada tahun 1913 ia bergabung dengan seorang Polandia yang bernama Florian Znaniecki (1881-1956), seorang Filsuf yang kemudian tertarik dan melakukan studi-studi di bidang sosiologi. Florian Znaniecki adalah seorang Direktur Asosiasi Perlindungan Emigran Polandia<sup>2</sup>. Ia menjadi kolega W.I. Thomas dan bersama-sama mengembangkan dasar-dasar studi Sosiologi Perkotaan Jean-Francois Dortier mencatat bahwa William Isaac Thomas (1863-1947) adalah salah satu dari sekian banyak Sosiolog Amerika yang kemudian mengembangkan aliran Sosiologi di Amerika yang dikenal dengan nama mahzab Chicago. Ia belajar sosiologi di Universitas Chicago, dan kemudian mengajar di tempat tersebut dalam bidang sosiologi juga (Cabin & Dortier, ed., 2004, 89-90).

Bagi para sosiolog di Universitas setempat, Chicago menjadi semacam laboratorium sosial. W.I. Thomas tertarik untuk mempelajari bagaimana efek dari kehidupan kota yang modern terhadap para pendatang baru, yang kemudian dikemasnya sebagai program riset ekologi perkotaan yang pertama kali bersama koleganya Robert E. Park dan kemudian studinya itu didukung juga oleh Florian Znaniecki. Florian Znaniecki sebenarnya adalah seorang filsuf yang selanjutnya tertarik dan bergelut pula di bidang sosiologi sebagai Profesor di Departemen Sosiologi Universitas Columbia. Ia kemudian pindah ke Chicago dan ketika bertemu dengan dan menjadi kolega W.I. Thomas ia dipercayakan sebagai Direktur Asosiasi Perlindungan Emigran Polandia. Studi-studi kelompok ini pertama-tama, berorientasi pada pembahasan mengenai situasi awal kehidupan petani, sistem sosial dan kehidupan ekonomi di Polandia.. Sesudah itu studi tersebut dilanjutkan dengan sebuah deskripsi mengenai disorganisasi kelompok primer (keluarga, komunitas kerja) yang menyebabkan orang-orang tertentu meninggalkan negerinya.

Akhirnya studi tersebut diarahkan untuk melihat fase di mana kaum urban itu menetap di Amerika, yang ditandai dengan terbentuknya sebuah komunitas dan terjadinya disorganisasi seperti : demoralisasi, keguncangan keluarga dan berbagai kejahatan.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 534.

Jadi melalui studi ini W.I. Thomas dengan kawan-kawannya ingin melakukan analisis tentang dampak urbanisasi, industrialisasi dan modernisasi dalam dunia modern. Melalui studi ini mereka memperlihatkan antara lain bahwa bentuk-bentuk kontrol sosial tradisional yang diterapkan kembali dalam kehidupan para migran sebagai alat kontrol ternyata lebih longgar dan lebih lemah terhadap perilaku kaum urban baik laki-laki maupun perempuan (Coser, 1977, 517).

## Pendekatan Studi

Metode studi dan pengumpulan data. Mengingat rumit dan amat bervariasi pengalaman hidup kaum urban Polandia, W.I. Thomas dan Florian Znaniecki mengembangkan pendekatan studi yaitu studi kasus untuk memahami bagaimana dinamika kehidupan sosial dan sejarah hidup pribadi kaum urban. Untuk maksud studi tersebut, data-data antara lain diperoleh dari dokumen pribadi kaum urban yang ditulis sendiri oleh kaum urban, seperti otobiografi yang diperoleh dari seorang urban yang bernama Wladek Wieszniewski.

Ia juga menggunakan 745 surat yang diperoleh setelah memasang iklan di sejumlah surat kabar berbahasa Polandia di kota itu dan berbagai informasi dari 8000 dokumen arsip surat kabar kota dan dokumen-dokumen lain selama tahun 1909-1910. Informasi-informasi yang diperoleh tersebut termasuk juga berbagai data dari organisasi migran Polandia yang antara lain terdiri dari catatan harian dan data sejarah tentang para migran Polandia di kota Chicago. Selain itu data dihimpun juga melalui informasi lisan dari kelompok-kelompok migran Polandia tentang kehidupan mereka (Coser, 1977: 533-534).

## Isu Pokok

Menurut W.I. Thomas dan F. Znaniecki, suatu "tipe sosial" atau sering dipahami sebagai "gaya hidup", bisa didefinisikan mulai dari perilaku dan nilai-nilai yang menuntun seseorang atau sekelompok orang "mengatur hidupnya". Dari hasil studi tersebut mereka menyatakan bahwa ada *tiga tipe sosial* masyarakat yang dominan, yaitu tipe Filistin, tipe Bohemia dan tipe Kreatif <sup>3</sup>.

- Tipe Filistin adalah orang yang konservatif. Perilakunya bertumpu pada tradisi, yaitu peraturan yang sudah ada. Baik ia seorang borjuis maupun petani sikapnya menghadapi kehidupan ditandai oleh kompromisme

---

<sup>3</sup> Menurut Dortier, kata Filistin berasal dari bahasa Perancis yang berarti orang tidak beradab atau kelompok orang yang dalam Kisah Perjanjian Lama dikalahkan oleh Samson, sedangkan Bohemia bisa berarti orang dari Bohemia atau orang yang hidup tanpa mengenal aturan atau tidak peduli dengan masa depannya. Lihat juga, Coser, 1977: 516-518.

terutama bila terjadi perubahan-perubahan yang tidak diduga-duga sebagai kenyataan terjadinya disorganisasi. Dengan kata lain mereka merumuskan bahwa *the Philistine who is "always a conformist, usually accepting social tradition in its most stable elements ... Every important and unexpected change in the condition of life results for such an individual in disorganization of activity."*

- Tipe *Bohemia* adalah orang yang dapat berubah namun sebagai pribadi atau diri yang tidak terbuka. Ia bisa sewaktu-waktu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan membiarkan diri dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, *the Bohemian, "whose possibilities of evolution are not closed, simply because his character remains unformed"*.
- Tipe *Kreatif* didefinisikan sebagai seorang inovator, yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru dan menunjukkan berbagai interest dalam berbagai aktivitas. Dan ia bisa memperlihatkan keunggulannya dalam berbagai aktivitas dengan memodifikasi sesuatu sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam catatan yang dibuat Coser disebutkan, *the Creative man is an innovator adaptable to new condition, displaying variegated interests. These are "compatable with a consistency of activity superior to that which tradition can give if the individual builds his life-organization not upon the presumption of the immutability of his sphere of social values, but upon the tendency to modify and to enlarge it according to some definite aim"* (Coser, 1977: 516-517).

Menurut Dortier (Cabin & Dortier, eds.: 2004, 95-96), tipologi yang dikedepankan oleh W.I. Thomas dan didukung oleh Znaniecki ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan situasi individu-individu yang tercabut dari akarnya di daerah perkotaan. Kaum urban tersebut berasal dari desa dan mendapati dirinya tenggelam dalam situasi dunia yang baru, yang boleh dikatakan dunia yang asing baginya. Akibatnya ada orang yang kemudian bergabung kembali dengan cara hidup tradisional, namun ada pula yang mulai membangun kehidupan yang baru dan "memanjat" tangga-tangga sosial yang baru dan yang lain lagi malah tenggelam dalam kesengsaraan dan kriminalitas. Oleh karena itu melalui hasil studi ini, Thomas dan Znaniecki ingin menyatakan bahwa "dalam interaksi yang berkesinambungan antara individu dengan lingkungannya ini tidak bisa dikatakan bahwa individu adalah hasil atau produk dari lingkungannya atau individu yang menghasilkan lingkungannya saja. Yang tepat adalah kedua-duanya<sup>4</sup>. Jadi individu adalah produk sekaligus produsen atas nasibnya sendiri dalam lingkungan di mana ia berada.

<sup>4</sup> Pikiran tersebut dapat dibandingkan dengan gagasan Peter L. Berger, mengenai Manusia dalam Masyarakat dan Masyarakat dalam Manusia. Yang dimaksud dengan manusia dalam Masyarakat ialah bahwa individu mempunyai tempat dalam masyarakat sesuai dengan *peta sosial* yang sudah dibuat untuk individu tersebut merangkak di atasnya. Artinya, keberadaan individu sudah ditentukan dalam masyarakat dan individu



Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Berger dan Luckmann bahwa “masyarakat merupakan produk manusia, masyarakat merupakan kenyataan obyektif dan manusia merupakan produk sosial”<sup>5</sup>. Itu berarti bahwa usaha untuk memahami manusia tidak an sich dilakukan hanya terhadap dirinya sendiri tetapi perlu memahami pula masyarakat dan keadaan sosial-budaya serta lingkungan hidupnya. Maksudnya berdasarkan hasil studi dan refleksi atas pengalaman kaum urban tersebut, W.I. Thomas ingin menyatakan bahwa jika individu-individu ditempatkan pada situasi yang sama maka reaksi mereka akan berbeda-beda sesuai dengan gambaran situasinya, yang disebutnya sebagai “*definisi situasi*”, yaitu suatu representasi yang dibuat seseorang atau sekelompok orang dari sebuah situasi yang mana ia atau kelompok itu turut memberi kontribusi dalam membangun situasi tersebut.

Menurut Coser, seluruh studi yang dibuat ingin menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi di antara sikap-sikap dan nilai-nilai karena fenomena sosial dan fenomena individual akan selalu merupakan suatu kombinasi yang mempengaruhi manusia. Karena itu dikatakan oleh Coser bahwa, Thomas dan Znaniecki merumuskan dasar pendekatan studi ini sebagai hubungan yang bersifat timbal balik mengenai ketergantungan antara organisasi sosial dengan kehidupan individual (1977: 513).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipe sosial kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, memperlihatkan bahwa setiap masyarakat mempunyai caranya sendiri untuk mendefinisikan situasi dan dirinya. Hal ini tentu amat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi yang dipunyai. Bagian berikut ini merupakan suatu usaha untuk membuat interpretasi lebih jauh mengenai tipe-tipe sosial masyarakat ala William Isaac Thomas. Namun kami tidak akan membuat suatu penggolongan masyarakat sebagaimana yang digambarkan oleh Thomas dan Znaniecki. Kami hanya akan mengangkat sejumlah ciri dari tipe-tipe sosial penggolongan masyarakat tersebut yang kiranya ada pada masyarakat tertentu yang boleh dikatakan memotivasinya mendefinisikan situasinya.

---

tersebut harus berlaku atau berbuat sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian individu merupakan produk masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat dalam manusia adalah bahwa masyarakat tidak saja menentukan apa yang individu perbuat tetapi juga menentukan *siapa individu* itu. Dengan kata lain penampilan dan perilaku individu merupakan ekspresi tampilan dan perilaku masyarakatnya dan keadaan diri individu sebenarnya adalah wujud gambaran masyarakat itu sendiri.

<sup>5</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 1990, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (terj.)*, Jakarta: LP3ES, hal. 87.



## Definisi Situasi sebagai Perilaku Kolektif

Kelompok masyarakat dengan *tipe sosial yang pertama* (tipe filistin) tentu akan mendefinisikan situasi hidupnya sebagai komunitas tradisi karena keadaan yang harus dijalani menurut tradisi adalah gaya hidup yang ideal. Dengan begitu menurut kelompok ini keadaan yang aman dan berpihak padanya adalah keadaan yang dijalani menurut tradisi baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diharapkan dilakukan oleh orang lain. Tapi sikap berkompromi juga merupakan salah satu ciri kelompok ini agar ia bisa tetap eksis.

Dari studi tentang *perilaku kolektif*<sup>6</sup> yang memotivasi seseorang atau sejumlah orang untuk mengambil sikap tertentu seperti yang dialami oleh masyarakat tipe sosial di atas dapat dikatakan didorong oleh adanya *keinginan untuk tetap berada dalam situasi aman* (the wish for security) atau terlindungi dan *keinginan untuk diakui* (the wish for recognition) oleh yang lain. Keinginan untuk diakui pertama-tama bukan berasal dari luar kelompok tetapi dari dalam kelompok itu sendiri.

*Tipe sosial masyarakat yang kedua* (tipe bohemia) merumuskan situasi hidupnya sebagai hidup yang berproses dan terus berubah namun dirinya tidak merupakan bagian dari perubahan tersebut. Dampak dari pendefinisian situasi seperti itu mempengaruhinya mendefinisikan dirinya sebagai diri yang bisa eksis bila melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dan sejauh dirinya dapat dipengaruhi oleh yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa kelompok ini lebih melihat diri sebagai pribadi yang tidak menentukan, bersifat pasif dan karena itu tidak akan banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan umum walaupun ia mengakui adanya perubahan di sekitarnya.

Sikap kelompok ini dapat digolongkan sebagai masyarakat yang mempunyai *keinginan mengalami hal-hal baru* walaupun dia sendiri tidak aktif memperjuangkannya karena ia tahu bahwa keberadaannya merupakan bagian dari perubahan yang sedang bergulir. Selain itu dapat dikatakan sebenarnya kelompok ini juga mempunyai *keinginan untuk ditanggapi* walaupun, mereka sendiri tidak akan menunjukkan keinginan tersebut.

Kelompok dengan *tipe sosial yang ketiga* (tipe kreatif), lebih melihat situasi dan dirinya sebagai inovator dan yang selalu bersifat kreatif serta pro-aktif menanggapi situasi yang ada. Inilah tanda dari kelompok masyarakat yang terbuka dan dinamis yang selalu mensiasati situasinya sehingga bisa selalu

---

<sup>6</sup> Lyford P. Edwards, dalam *The Natural History of Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970, p. 2-3, menyatakan bahwa dalam teori motivasi ada empat kecenderungan atau keinginan utama yang dirumuskan oleh Thomas yang biasanya mendorong orang menyatakan keberadaannya, yaitu: (a) keinginan akan pengalaman baru, (b) keinginan akan adanya perlindungan atau rasa aman, (c) keinginan akan adanya pengakuan, (d) keinginan akan adanya tanggapan.



eksis. Kelompok ini dapat dikatakan mempunyai motivasi dan keinginan yang berbeda dari kedua kelompok terdahulu. Dari keberadaannya dalam situasi yang baru kelompok ini lebih menyadari keberadaannya sebagai bagian dari sebuah masyarakat yang baru sehingga ia mempunyai keinginan untuk mengalami hal-hal yang baru. Dalam situasi yang baru ada keinginan akan terjaminnya rasa aman, diakui bukan saja oleh kelompoknya tetapi terlebih oleh kelompok baru di mana ia berada. Berikut ini diuraikan beberapa pengalaman masyarakat mendefinisikan situasi dan dirinya.

### ***Pengalaman Pemuda dan Founding Fathers Indonesia***

Pada Mei 1926 diadakan Konggres Pemuda yang pertama di Betawi. Konggres ini dilakukan karena ada dorongan kuat kaum muda untuk mendefinisikan diri dan situasinya dalam kerangka cita-cita “persatuan” sebagai suatu bangsa. Selanjutnya, dalam sambutan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1978, di Stadion Senayan Jakarta, Presiden R.I, menyatakan bahwa, 50 tahun yang lalu lahirlah Sumpah Pemuda yang mengaku :

*berbangsa satu, Bangsa Indonesia;*  
*bertanah air satu, Tanah Air Indonesia;*  
*berbahasa satu, Bahasa Indonesia.*

Dikatakan oleh Kepala Negara bahwa Sumpah Pemuda mempunyai arti yang amat penting dan monumental bagi *persatuan* sebagai babak baru perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sebagai satu bangsa dan yang mempunyai ilham kepatriotan dan kepahlawanan dan sekaligus sebagai puncak kebangkitan nasional yang telah dimulai 20 tahun sebelumnya oleh Budi Utomo.<sup>7</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Nani Nurrachman mengatakan bahwa tahun 1908, 1928 dan 1945 adalah momen eskalasi dari wacana yang berkembang dan pada akhirnya terkristalisasi dalam bentuk sikap yang nyata dan kuat tampilan keteguhan jiwa para pemuda Indonesia. Ia mengutip sejarawan Indonesia, Anhar Gonggong yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia yang merdeka bermula dari bhineka, dan tidak berakhir ketika bangsa Indonesia bersepakat, berdialog untuk bersatu dan menjadi satu. Selanjutnya Anhar Gonggong menegaskan bahwa kata *bersatu* dan menjadi *satu* justru dihasilkan oleh kesadaran cerdas, tercerahkan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, *Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR, 1993, Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris*, hal. 579-589.

<sup>8</sup> Nani Nurrachman, 2002, “Indonesia: *A Nation in Search of Its’ Soul* (Indonesia: Pergumulan Jiwa suatu Bangsa).” *Spekturm* (No. 3 Tahun XXX), hal. 19-29.



Dengan kata lain pendefinisian situasi dan diri Pemuda Indonesia seperti itu sesungguhnya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat untuk menyatukan berbagai komponen dan kelompok kaum muda yang muncul dengan identitas daerah atau etnik dan agama yang rupanya mempunyai satu semangat yang sama yaitu ingin bersatu sebagai “Pemuda Indonesia” yang memelopori sebuah perjuangan dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa asing menuju kemerdekaan yang penuh sebagai *satu bangsa*. Pernyataan dan semangat “persatuan” seperti itu merupakan sebuah pendefinisian situasi dan diri sebagai sebuah *kesadaran kolektif* kaum muda dan masyarakat Indonesia pada waktu itu sebagai sebuah *kesadaran baru* akan sebuah *identitas* dan *entitas* yang disebut Indonesia. Rumusan tersebut kemudian diterima oleh peserta kongres dengan suara bulat.<sup>9</sup>

Pengalaman monumental Pemuda Indonesia tersebut kemudian didukung dan dipertegas oleh Soekarno ketika menyampaikan pidato pencetusan lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara yang disebutnya sebagai satu *Nationale Staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumetara sampai ke Irian.<sup>10</sup> Selanjutnya ketika pada 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, hal ini sesungguhnya merupakan suatu ekspresi sikap sosial politik orang Indonesia pada waktu itu untuk menyatakan diri dan mendefinisikan situasi dan diri dalam format baru yang disebut sebagai *Bangsa Indonesia*, yaitu bangsa yang bermartabat, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan bebas dari segala bentuk penjajahan serta penindasan. Pada saat itulah lahirnya sebuah komunitas bangsa yang baru yang de facto dan de yure disebut Indonesia, dengan pernyataan yang berbunyi:

“*Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan . . .*”<sup>11</sup>

Catatan pertama yang dapat dibuat atas ke dua pengalaman tersebut di atas sesungguhnya merupakan suatu representasi konfigurasi dari tipe sosial masyarakat yang dalam kerangka analisis W.I. Thomas disebut sebagai masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat dan sanggup merumuskan diri sebagai suatu komunitas baru. Selain itu, sebagai satu bangsa baru, bangsa Indonesia ingin diakui dan dihargai sebagai bangsa yang merdeka.

<sup>9</sup>Pipitseptra, 1973, *Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia*, Ende: Nusa Indah, hal. 255-256.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 297-298.

<sup>11</sup> Haji Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Jakarta, hal. 21.

Catatan berikutnya ialah bahwa situasi kaum muda pada masa itu yang amat dijiwai oleh semangat perjuangan dan telah menemukan *identitas* diri yakni identitas sebagai Pemuda dari satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air yang disebut Indonesia. Dengan kata lain ciri *inovatif* yang didasari oleh nilai dan roh persatuan telah memungkinkan mereka mampu menguasai diri, mengatasi segala perbedaan etnis dan daerah, merelakan diri secara bersama-sama masuk dalam satu *kesadaran kolektif* sebagai *pemuda Indonesia*.

Dalam roh dan semangat yang sama dengan kaum muda tersebut itulah kemudian *Founding Fathers* Indonesia juga berani mendefinisikan fenomena masyarakat Indonesia yang pluralistik dan tersebar di seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang disebut Nusantara, ke dalam satu perjuangan politik dengan sebuah identitas komunitas baru yang disebut sebagai *Bangsa Indonesia*.

Kemampuan mendefinisikan diri dan situasi seperti inilah yang menurut Titaley secara sosiologis Bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan suatu fenomena baru. Bangsa Indonesia disebut sebagai suatu *fenomena baru* karena ia secara historis, politis dan sosiologis merupakan suatu bangsa yang baru dan bukan merupakan kelanjutan dari kerajaan Majapahit dan Sriwijaya atau kerajaan lainnya di masa lalu.

Dari segi kehidupan beragama Indonesia bukan hanya Islam, Kristen, Hindu atau Kejawen atau Kaharingan dan lain sebagainya, sedangkan dari segi etnik dan budaya, Indonesia bukan hanya Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi atau Maluku. Indonesia adalah semuanya yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kejawen, Kaharingan dan meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Papua. Jadi Indonesia adalah suatu fenomena baru yang meliputi semuanya dari Sabang sampai Merauke.<sup>12</sup> Sebagai suatu fenomena baru Indonesia telah menjadi suatu realitas sosial, politis, budaya, agama, ekonomi dan wilayah yang integral. Itulah konsekuensi dari definisi situasi Indonesia.

### ***Pengalaman Umat Islam Indonesia***<sup>13</sup>

Dalam tulisan yang berjudul Islam di Indonesia dan masalah definisi, Rakhmat menjelaskan tiga hal yaitu pertama, bagaimana definisi mengenai umat Islam; kedua, definisi mengenai siapa yang disebut sebagai pemimpin Islam; dan

---

<sup>12</sup> John Titaley, *Pluralisme Agama dan Nasionalisme*, Bahan Ceramah dalam Seminar Agama-Agama XII, 14-20 September 1992, di Tugu Bogor, hal. 11-14.

<sup>13</sup> Jalaluddin Rakhmat, 1989, "Islam di Indonesia: Masalah Definisi", dalam M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia, suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: Rajawali, hal. 37-57.

ketiga, definisi mengenai syariat Islam. Dalam pembahasan selanjutnya hanya akan disajikan sebagai contoh bagaimana definisi mengenai umat Islam dan pemimpin Islam sebagai suatu ekspresi dan representasi masyarakat mengenai diri dan situasinya.

**Definisi mengenai umat Islam.** Menurut Rakhmat ada lima cara untuk membuat definisi mengenai umat Islam. *Pertama*, Umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam. Dengan definisi ini mau dinyatakan bahwa dari segi jumlah penduduk beragama Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, walaupun sebagian besar di antara mereka tidak memahami Islam. Dan banyak di antara mereka menurut kategori Geertz adalah kelompok abangan dan priyayi. *Kedua*, Umat Islam juga didefinisikan sebagai orang yang sudah menjalankan ritus-ritus keagamaan atau upacara-upacara ibadat, seperti shalat, zakat, shaum dan haji. Dengan definisi seperti ini maka jumlah umat menurun drastis, walaupun belum ada penelitian mengenai hal ini. *Ketiga*, umat Islam adalah himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran-ajaran Islam. Menurut Rakhmat kelompok ini jumlahnya sangat kecil. *Keempat*, Umat Islam adalah himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kelompok ini dapat dilihat dalam aktivitas mereka di sekitar masjid, organisasi kemasyarakatan Islam atau anggota-anggota jamaah yang dibina secara teratur. Menurut Rahmat, mungkin ini yang dimaksud oleh Donald K. Emmerson sebagai "active minority". *Kelima*, umat Islam adalah himpunan orang Islam yang terlibat secara ideologis dengan ajaran Islam. Jalaluddin menyatakan bahwa kelompok ini pada umumnya disebut "kaum fundamentalis". Mereka melihat Islam sebagai suatu *weltanschauung* yang harus dijadikan dasar dalam memandang persoalan-persoalan dunia.

Menurut Rahmat dengan definisi seperti ini umat Islam hanya tergolong kecil. Selanjutnya dikatakan bahwa definisi yang bermacam-macam mengenai umat Islam seperti ini mengaburkan pemikiran dan mengacaukan pengambilan keputusan. Kerancuan dalam pendefinisian seperti di atas menimbulkan perbedaan strategi dalam perjuangan. Bagi kelompok yang mengutamakan definisi umat Islam secara nominal tentu akan bersikap lebih kompromistis karena memandang semua orang lain sebagai umat Islam juga, sedangkan yang mendefinisikan umat Islam secara ideologis akan bersifat lebih nonkompromistis, ekstrim dan revolusioner.

**Definisi tentang pemimpin Islam.** Selain definisi mengenai umat ada pula definisi mengenai pemimpin Islam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa di Indonesia terdapat definisi pemimpin Islam sebagai berikut: *pertama*, pemimpin Islam adalah pemimpin masyarakat yang beragama Islam. Ia disebut sebagai *umara* atau *zu'ama*. Seorang pejabat negara atau pemerintah yang



beragama Islam, misalnya, dapat digolongkan sebagai pemimpin Islam. *Kedua*, pemimpin Islam ialah para ulama yang mempunyai pengikut di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, dalam konteks tertentu pemimpin Islam juga adalah seorang cendekiawan dan/atau orang yang pandai berbicara di mimbar. *Keempat*, pemimpin Islam didefinisikan sebagai tokoh-tokoh yang menduduki posisi-posisi pimpinan dalam organisasi-organisasi (politik dan massa) yang berazaskan Islam.

Definisi-definisi seperti di atas baik mengenai umat Islam maupun tentang pemimpin Islam, menurut Jalaluddin amat ditentukan oleh persepsi seseorang dan persepsi tersebut sangat dipengaruhi pula oleh informasi yang diperoleh seseorang. Kalau kita menyimak lebih jauh apa yang dikatakan oleh Rahmat tersebut sebenarnya juga berlaku bagi masyarakat lainnya karena cara pandang yang membuat masyarakat mendefinisikan situasi dan dirinya terbedakan dari yang lainnya amat dipengaruhi dan ditentukan oleh distribusi pengetahuan yang ada padanya.

Motivasi pendefinisian di sini dapat dikatakan didasari oleh adanya semangat kepatuhan akan ajaran agama yang perlu diakui oleh kaum Muslim sendiri menyangkut siapa yang dapat disebut sebagai pemimpin Islam dan siapa saja yang dimaksud dengan umat Islam. Dengan demikian sebagai suatu kelompok masyarakat beragama tidak terjadi berbagai penafsiran atau interpretasi lain mengenai siapa saja yang disebut pemimpin dan umat Islam. Artinya dari segi definisi yang dibuat diharapkan terbentuk sebuah peta kognitif yang sama bagi umat Islam sehingga terjaminlah pemahaman bersama umat Islam Indonesia mengenai apa yang disebut pemimpin dan umat Islam dan itu tentu berbeda dari jenis-jenis pemimpin yang lain dan umat beragama yang lain.

### ***Masyarakat Papua dan Definisi Situasi***

Bagi masyarakat Papua ada dua bentuk pendefinisian situasi dan diri yang dikenal. Definisi pertama berkaitan dengan definisi situasi dan diri sebagai komunitas moral atau keagamaan. Kedua, sebagai komunitas politik tokoh-tokoh Kristen Papua mencoba mendefinisikan arti pembangunan secara khusus bagi masyarakat Papua. Berikut ini diuraikan kedua pendefinisian situasi dan diri masyarakat Papua.

**Komunitas moral.** Ide mengenai komunitas moral diambil dari makalah kami, "Gereja dan Konflik serta Kekerasan di Papua", yang merupakan pengantar diskusi berkait dengan persoalan kekerasan dan konflik serta upaya mengembangkan budaya damai dalam kehidupan masyarakat di



tanah Papua, yang disoroti dari peranan agama-agama.<sup>14</sup> Pembahasan pokok tersebut diawali dengan mengedepankan gagasan mengenai masyarakat Papua dan definisi situasi.

Bagian awal makalah tersebut ditulis berdasarkan latar belakang pemikiran bahwa masyarakat pada umumnya merupakan suatu realitas dari kekuatan-kekuatan kreatif seperti agama, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal-hal yang disebutkan ini tentu mempunyai pengaruh terhadap manusia baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat untuk membuat definisi mengenai situasi dan dirinya. Dalam tulisan itu diuraikan bahwa, mengacu pada paham W.I. Thomas, definisi situasi diartikan sebagai persepsi seseorang dan penafsirannya tentang konfigurasi faktor-faktor yang memungkinkan individu atau kelompok ikut ambil bagian di dalamnya dan bertindak laku sesuai dengan apa yang diharapkan dari individu tersebut. Karena itu setiap situasi bila dirumuskan secara berbeda akan melahirkan tingkah laku yang berbeda pula. Namun secara kolektif sebagai masyarakat yang hidup bersama dan mengalami situasi tertentu yang sama seperti masyarakat Papua tentu mempunyai pemahaman tersendiri mengenai realitas hidupnya. Dalam makalah tersebut tidak dirumuskan secara deskriptif mengenai apa yang dimaksud dengan definisi situasi masyarakat Papua. Namun melalui pertanyaan-pertanyaan, gagasan mengenai definisi situasi masyarakat Papua tersirat di dalam rumusan pertanyaan berikut:

- Apakah kita sebagai warga masyarakat Papua selalu sadar dan berpegang teguh pada sejarah daerah ini yaitu bahwa Tanah Papua adalah tanah yang telah diberkati Tuhan?
- Perilaku yang bagaimana diharapkan ada dari kita semua di tanah Papua untuk mewujudkan arti “Tanah Papua yang Diberkati?”

Pertanyaan-pertanyaan di atas sebenarnya ingin menggugah setiap orang Papua, baik sebagai individu maupun secara kolektif bahwa masyarakat Papua bukan hanya bagian dari suatu komunitas politis dan budaya tetapi juga merupakan komunitas Kristiani. Sebagai komunitas kristiani dia tidak hanya menjadi komunitas sosial tetapi justru ia telah menjadi sebuah *komunitas moral* atau *komunitas rohani* yang hidup di atas tanah yang diberkati Allah sendiri. Kesadaran kolektif mengenai komunitas moral atau komunitas rohani serta apa yang diharapkan dari komunitas tersebut mengandaikan bahwa masyarakat Papua mempunyai *peta kognitif* yang sama mengenai arti dan peran komunitas moral atau komunitas rohani tersebut. Karena itu, definisi situasi dan diri seperti yang dibuat di atas perlu dipahami sebagai ekspresi yang menggambarkan

---

<sup>14</sup> Berry Renwarin, 2002, *Gereja dan Konflik serta Kekerasan di Papua*. Tulisan ini merupakan ulasan dari pengantar diskusi dalam Lokakarya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Papua, Sentani-Jayapura, 12 November 2002.

suatu perspektif baru mengenai sebuah *identitas* baru masyarakat Papua yang dilihat dari perspektif penghayatan hidup sebagai masyarakat beragama.

Selain itu, Agust Kafiar,<sup>15</sup> juga merumuskan suatu tema diskusi yang bersifat misioner dan visioner menjelang peringatan Hari Pekabaran Injil di Papua, 5 Februari 2003 yang lalu, yang berbunyi: “Pembangunan<sup>16</sup> Papua dimulai dari Mansinam”, yang disampaikan pada kesempatan Diskusi Panel yang dihadiri oleh Para Pimpinan Gereja dan Perguruan Tinggi Kristen Se Indonesia Timur di Jayapura, pada 1 Februari 2003. Yang ingin ditekankan oleh Kafiar yaitu perlu disadari dan diakui oleh semua komponen baik pemerintah daerah, Gereja-gereja dan umat Kristen di Papua bahwa Tuhan, melalui Gereja, telah memulai pembangunan di tanah ini. Karena itu, kewenangan dan tanggung jawab yang diemban untuk membangun daerah ini dan masyarakatnya hendaknya tidak disalahgunakan.<sup>17</sup> Dalam kata pengantar buku yang ditulis oleh Sostenes Sumihe,<sup>18</sup> Constant Karma,<sup>19</sup> selaku ketua panitia juga menyatakan bahwa pembangunan di Papua mempunyai sejarah yang panjang dan bukan hanya manusia yang berperan di dalamnya tetapi kekuatan dan kuasa Tuhan sendiri telah berpengaruh dalam proses sejarah pembangunan tanah ini.

Pernyataan-pernyataan tersebut tentu merupakan suatu cara pandang dan refleksi yang mendalam mengenai arti dan sejarah pembangunan di tanah Papua. Dengan kata lain melalui pemahaman bersama tokoh-tokoh Kristen di Papua didefinisikan sebuah arti dari sejarah pembangunan daerah ini sebagai suatu usaha yang bukan semata-mata merupakan usaha manusiawi melainkan juga merupakan campur tangan Tuhan sendiri melalui hamba-hamba-Nya. Karena itu, implikasinya ialah pembangunan di Papua bukan sekedar sebuah kegiatan fisik tetapi suatu usaha pengembangan daerah dan manusia yang berlandaskan nilai-nilai moral-keagamaan, sebagai bukti bahwa memang tanah ini adalah tanah yang diberkati Tuhan.

---

<sup>15</sup> Mantan Rektor Universitas Negeri Cendrawasih dan sekarang sebagai salah satu *Vice President* PTFI.

<sup>16</sup> Menurut Nico Schulte Nordholt, kata “pembangunan” sepadan dengan kata “*development*” yang mempunyai konotasi “pertumbuhan”. Tetapi dalam arti lebih teknis diartikan sebagai “perkembangan” dan mempunyai arti yang lebih kualitatif (Nordholt 1987: 15).

<sup>17</sup> Agust Kafiar, 2003, *Gereja dan Pembangunan di Tanah Papua*, Makalah Seminar, Jayapura, hal. 2.

<sup>18</sup> Sostenes Sumihe, 2003, *Pembangunan Papua Dimulai dari Mansinam*, Jayapura: Panitia Perayaan Hari Pekabaran Injil Di Tanah Papua, hal. i.

<sup>19</sup> Sekarang Wakil Gubernur Provinsi Papua.

Pernyataan di atas sebenarnya merupakan bentuk lain dari pernyataan bahwa sejak Hamba Tuhan Ottow dan Geissler<sup>20</sup> menginjakkan kaki di tanah ini untukewartakan Injil Tuhan, tanah ini telah menjadi tanah yang *penuh berkat* di satu sisi dan di sisi lain sebagai *tanah yang terbuka* bagi Tuhan dan karya hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain kehadiran mereka merupakan berkat Tuhan atas daerah ini, karena merupakan suatu babak baru, babak terang, babak kabar baik (*euangelion*) bagi masa depan orang Papua.

Dengan kata lain pernyataan-pernyataan tersebut di atas ditujukan kepada setiap orang Papua baik sebagai individu maupun secara kolektif, baik sebagai pemerintah, komponen masyarakat lainnya maupun sebagai anggota gereja bahwa kita bukan hanya sebagai komunitas politis dan budaya tapi juga merupakan komunitas Kristiani atau komunitas keagamaan. Sebagai komunitas kristiani dia tidak hanya menjadi komunitas sosial tetapi justru ia telah menjadi sebuah *komunitas moral* atau *komunitas rohani* yang hidup di atas tanah yang diberkati Allah sendiri. Kesadaran kolektif mengenai komunitas moral atau komunitas rohani serta apa yang diharapkan dari komunitas tersebut mengandaikan bahwa masyarakat Papua mempunyai *peta kognitif* yang sama mengenai arti dan peran komunitas moral atau komunitas rohani tersebut. Namun perlu diingat bahwa definisi situasi dan diri seperti itu selalu merupakan definisi atas situasi sosial-budaya yang kiranya tentu mempunyai implikasi dan konsekwensi sosial pula. Karena itu, definisi situasi dan diri seperti yang dibuat di atas perlu dipahami sebagai ekspresi yang menggambarkan suatu perspektif baru mengenai sebuah *identitas* baru masyarakat Papua yang dilihat dari perspektif penghayatan hidup sebagai masyarakat beragama. Dengan kata lain kesadaran seperti ini merupakan kesadaran yang bersumber dan ditentukan oleh situasi sosial dan perubahan serta perkembangan yang terjadi di Papua hingga saat ini.

Ada dua hal yang dapat dikatakan di sini yaitu, pertama, sebuah pengalaman baru terjadi di Papua sejak masa penginjilan awal yaitu suatu perubahan melalui pembangunan masyarakat yang dimulai dari Mansinam, karena pengalaman serupa itu sebelumnya tidak ada atau tidak dialami; kedua, pernyataan Kafiir tersebut perlu diakui (keinginan untuk diakui) baik oleh komunitas Kristen sendiri maupun oleh kelompok-kelompok lainnya, karena hanya dengan pengakuan seperti itu terbangunlah sebuah kesadaran bersama atau kesadaran kolektif masyarakat Papua, yang mempunyai arti dan dampak yang amat signifikan terhadap perilaku masyarakat selanjutnya.

---

<sup>20</sup> F. Ukur & F.L. Cooley, 1977, *Benih yang Tumbuh VIII*, Jakarta: LPS DGI, hal. 22.

## Definisi Situasi dan “Epistemologi Orang Dalam”<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang atau suatu kelompok masyarakat mencoba mendefinisikan situasi seperti beberapa contoh yang diangkat dalam tulisan ini atau yang dapat ditemukan pada pengalaman-pengalaman masyarakat lainnya, sesungguhnya usaha tersebut merupakan suatu usaha pengartian atau pemaknaan pengalaman dan realitas sosialnya yang obyektif. Pemaknaan tersebut didasari oleh sebuah latar belakang pemikiran yang boleh disebut sebagai sebuah epistemologi situasi ketika individu atau kelompok masyarakat tertentu secara obyektif mengalaminya dan realitas itu ternyata merupakan pusat pergumulan diri dan hidup.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pokok “epistemologi orang dalam”, perlulah sejenak kita mengingat kembali bahwa latar belakang dan latar depan percakapan mengenai masyarakat di sini adalah paham mengenai sebuah masyarakat yang *interaktif*. Maksudnya ialah suatu kehidupan bersama sekelompok orang atau suatu masyarakat yang ditandai dengan adanya relasi timbal balik. Relasi yang demikian itu ditandai oleh adanya interaksi antar individu dan atau antarkelompok, termasuk di dalamnya adanya interaksi antara individu dengan kelompoknya atau dengan kelompok lainnya dan bersifat saling mempengaruhi.<sup>22</sup> Selaras dengan maksud ide masyarakat yang interaktif tersebut, kita perlu melirik sejenak gagasan Habermas mengenai tindakan sosial, yang dapat dilihat dalam dua dimensi berikut ini. Kedua dimensi itu ialah “kerja” dan “interaksi atau komunikasi”. Dua bentuk tindakan sosial yaitu satu, *tindakan rasional bertujuan* (ada dalam kerja) dan kedua, *tindakan komunikatif* (ada dalam komunikasi). Tindakan sosial dilihatnya sebagai tindakan komunikatif, yaitu tindakan yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal-balik di antara subyek-subyek yang berinteraksi.<sup>23</sup>

Dalam konteks kehidupan yang interaktif itu dapat dipertanyakan bagaimana sebenarnya arti, fungsi dan peranan serta pengaruh “epistemologi orang dalam?” “*Epistemologi orang dalam*” sebenarnya merupakan suatu istilah teknis yang berkaitan dengan solipsisme. *Solipsisme* adalah *suatu pandangan atau paham bahwa seseorang tidak dapat menyadari apa pun di luar*

<sup>21</sup> Brian Fay, 1997, *Contemporary Philosophy of Social Science, A Multicultural Approach*, Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd, p. 9-12.

<sup>22</sup> Berry Renwarin, 1996, *Marind Samkai, Studi Kasus tentang Pengaruh Transformasi terhadap Partisipasi Marind Samkai dalam Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke-Irian Jaya*, Salatiga: Univeritas Kristen Satya Wacana (Tesis Pascasarjana), hal. 15.

<sup>23</sup> F. Budi Hardiman, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik & Modernitas Menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 76-80.

*pengalaman, keadaan dan tindakan-tindakannya sendiri.* Dengan kata lain dalam pandangan ini mau diungkapkan bahwa hanya individu itu saja yang bisa memahami dirinya sendiri dan keadaannya. Kalau paham ini diterapkan pada pengalaman dan kehidupan suatu kelompok berarti hanya kelompok itu yang mengetahui dan memahami kelompoknya. Penjelasan ini mengandung implikasi pemahaman bahwa orang atau kelompok lain tidak bisa memahami dan mengetahui apa pun yang ada dalam orang atau kelompok lain. Itu berarti bahwa hanya individu itu sendiri atau orang yang ada di dalam kelompok itu yang dapat memahami siapa dirinya dan apa arti tindakannya, sedangkan orang lain di luar kelompok tersebut tidak mampu memahami apa yang ada dan dilakukan orang atau kelompok tersebut.

Diskusi lebih jauh mengenai hal ini dibuka oleh Brian Fay dengan pertanyaan “apakah engkau harus menjadi seseorang untuk mengetahui seseorang?” (“*Do you have to be one to know one?*”) Dengan kata lain, apakah untuk memahami ‘orang dalam’ kita harus menjadi ‘orang dalam’ itu sendiri? Pernyataan bahwa hanya seseorang atau kelompok orang yang berasal dari kelompok itu yang dapat memahami, menyadari keadaan dan harapan-harapan serta tindakannya sendiri, itulah yang dimaksud dengan “epistemologi orang dalam”.

Kalau menggunakan pendekatan William I. Thomas mengenai “definisi situasi”, dapat dikatakan bahwa pemahaman yang demikian merupakan akibat dari cara seseorang atau kelompok mendefinisikan situasi dan diri. Dengan kata lain “epistemologi orang dalam” merupakan salah satu cara orang memandang diri dan situasinya walaupun dapat memberi kesan sebagai cara pandang yang eksklusif yakni cara pandang hanya terbatas dan berpusat pada individu atau kelompok tertentu saja dan terbatas pada situasi tertentu pula. Padahal dalam konteks yang lebih luas di tempat seseorang hidup bermasyarakat sebenarnya selalu terjalin interaksi antara individu dengan individu lain, antara individu dengan masyarakat antara kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Akibat dari interaksi semacam itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Peter L. Berger, *pertukaran subyektivitas* di antara keduanya sehingga sudah tentu keberadaan seseorang atau kelompok akan didefinisikan secara lain pula sebagai akibat dari interaksi yang terjadi. Dengan demikian runtuhlah apa yang dikatakan kekuatan “*epistemologi orang dalam*” karena terjadilah sebuah pengertian atau pengindetifikasian sebagai akibat dari adanya interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan masyarakat sehingga lahirlah sebuah pemahaman baru mengenai suatu realitas. Dengan kata lain pendefinisian situasi sebagai sebuah “epistemologi orang dalam” tidak dibangun dari sebuah realitas kosong, melainkan keadaan tersebut merupakan hasil dari sebuah proses internalisasi, obyektivasi dan eksternalisasi *pengalaman* sebagai akibat dari adanya interaksi atau komunikasi. Dengan kata lain, “epistemologi orang dalam” tidak dapat



ditempatkan dalam ketiadaan hubungan atau interaksi dengan lingkungan kehidupan sosial lainnya, karena bila hal itu yang menjadi dasar pemahaman individu atau kelompok, maka individu atau kelompok itu akan jatuh ke dalam apa yang disebut gejala *reifikasi* (Berger & Luckman, 1990: 128). Padahal kehidupan individu dan masyarakat merupakan hasil sebuah rekonstruksi sosial. Dengan kata lain realitas sosial merupakan produk manusia dan sekaligus memproduksi manusia.

### Catatan Penutup

Cara suatu kelompok masyarakat mendefinisikan situasi dan dirinya, sesungguhnya bertitik tolak dari kesadarannya akan realitas sosial, budaya, politik dan agamanya. Definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat tertentu dapat menimbulkan persepsi dan penilaian yang lain bahkan dapat dikatakan keliru oleh kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu masyarakat yang lebih interaktif atau komunikatif untuk membangun sebuah pemahaman bersama akan sebuah situasi yang memotivasi suatu masyarakat sebagai kesadaran kolektif suatu masyarakat. Karena kehidupan sosial itu merupakan produk sosial masyarakat dan setiap individu berperan sebagai *co-producer* bagi yang lain, setiap saat sebenarnya sedang terjadi apa yang disebut sebagai rekonstruksi sosial kehidupan masyarakat.

Untuk memahami suatu masyarakat tertentu diperlukan sebuah pemahaman mengenai “epistemologi kelompok” dan motivasi atau kecenderungan kelompok tertentu sebagai acuan yang memotivasinya untuk mengartikan situasi dan dirinya. Dengan pemahaman terhadap kelompok dan orang lain diharapkan tidak terjadi apa yang selama ini dan sedang mewarnai proses interaksi masyarakat yaitu adanya pengkategorian-pengkategorian sebagai stigmatisasi yang asosial, ahistoris, dan bersifat politis, eksploitatif dan diskriminatif, sebagai yang “superior” di satu pihak, sementara di pihak lain ada yang “inferior”; atau ada yang “maju” dan ada yang “terbelakang”; ada yang “pintar” dan ada yang “bodoh” dan sebagainya. Pemahaman bersama diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari kejatuhan pada kebiasaan dan kecenderungan yang tidak humanistik, menjadi bersifat lebih apresiatif dalam semangat kemanusiaan yang lebih setara dan bermartabat.

Yang perlu dipahami ialah bahwa proses belajar secara sosial atau sosialisasi merupakan sebuah proses yang terus berlangsung. Namun diperlukan sikap yang jujur dan terbuka untuk belajar dan mengalami pengalaman orang lain. Dapatkah suatu masyarakat terbebaskan dari kebiasaan kecenderungan melakukan stereotip dan stigmatisasi?



## Daftar Rujukan

- Berger, Peter L. & Luckmann Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. (Terj.)*, Jakarta: LP3ES.
- Cabin, Phillipe & Dortier Jean Francois (Eds.). 2004. *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya. (Terj.)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Coser, Lewis A. 1977. *Masters of Sociological Thought, Ideas in Historical and Social Context*. Second Edition, New York: HBJ.
- Edwards, Lyford P. 1970. *The Natural History of Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Fay, Brian. 1997. *Contemporary Philosophy of Social Science, A Multicultural Approach*. Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd.
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kafiar, Agus. 2003. *Gereja dan Pembangunan di Tanah Papua*. Makalah Seminar, Jayapura.
- Liem, Yusiu. 2000. *Prasangka terhadap Etnis Cina*, Jakarta: Djembatan.
- Nordholt, Nico Shculte. 1987. *Ojo Dumeh, Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1989. "Islam di Indonesia: Masalah Definisi", dalam M. Amien Rais (ed.), *Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*. Jakarta: Rajawali.
- Renwarin, Berry. 1996. *Marind Samkai, Studi Kasus tentang Pengaruh Transformasi terhadap Partisipasi Marind Samkai dalam Pengembangan Masyarakat di Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke-Irian Jaya*. Univeritas Kristen Satya Wacana (Tesis Pascasarjana), Salatiga.
- 2002. *Gereja dan Konflik serta Kekerasan di Papua, Jayapura*. Makalah Lokakarya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Papua, Sentani-Jayapura.
- Sumihe, Sostenes. 2003. *Pembangunan Papua Dimulai dari Mansinam*. Panitia Perayaan Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura.
- Thomas, W.I & Znaniecki. 1979. "A Polish Peasant Family", dalam Teodor Shanin (ed.), *Peasants And Peasant Societies*. New York: Penguin Books, p. 23-29.



Titaley, John. 1977. *Pluralisme Agama dan Nasionalisme*. Bahan Ceramah dalam Seminar Agama-Agama XII, 14-20 September 1992, di Tugu Bogor.

Ukur F.& Cooley F.L. *Benih yang Tumbuh VIII*. Jakarta: LPS DGI.

Yamin, Haji Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama, Jakarta.

